

JURNAL

HAK NARAPIDANA WANITA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

BEBY DIANA ROMANIA

NPM	: 130511445
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
HAK NARAPIDANA WANITA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Bebby Diana Romania

NPM	: 130511445
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 26 Januari 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", written over a horizontal line.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan,



Endro Susilo, S.H., LL.M.

HAK NARAPIDANA WANITA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA

Beby Diana Romania
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail : babydiana_06@yahoo.com

Abstract

The title of this legal writing is "The Rights of Breastfeeding Women Prisoners in Correctional Facility Class II A Wirogunan Yogyakarta". This type of research is normative legal research. Normative legal research is a research conducted or focusing on norm of positive law in the form of legislation. Legal issues raised is whether the rights of breastfeeding women prisoners in Correctional Facility Class II A Wirogunan Yogyakarta is in compliance with applicable provisions. The purpose of this research is to find out the rights of breastfeeding women prisoners in Correctional Facility Class II A Wirogunan Yogyakarta is in compliance with applicable provisions. The results showed that the rights of breastfeeding women prisoners in Correctional Facility Class II A Wirogunan Yogyakarta have not given optimally on additional food and facilities place for breastfeeding women prisoners, however the correctional facility of Class II A Wirogunan Yogyakarta is already well in providing Healthy Services and dispensation not to follow all activities of the breastfeeding women prisoners. This things recommended that Article 20 Paragraph (1) Indonesia Republican Government regulation Number 32 of 1999 about an terms and procedures for the implementation of the rights of prisoners should be revised, and correctional instituties to provide breastfeeding facilities for inmates.

Keywords: *Breastfeeding, Women Prisoners, Correctional Facility, Nutritious Food*

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.¹ Dalam hal ini, menegaskan bahwa baik wanita dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum. Setiap manusia mempunyai hak yang sama seperti manusia lain pada umumnya tidak terkecuali bagi narapidana yang dijatuhi hukuman akibat melakukan perbuatan melanggar hukum. Pada dasarnya, narapidana tidak berbeda dengan manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dipidana.

Pada dasarnya, hak narapidana wanita dan hak narapidana laki-laki adalah sama, namun wanita memiliki hak kodrati yang berbeda dengan hak laki-laki yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini, hak-hak narapidana wanita harus lebih dilindungi dan mendapat perhatian yang khusus, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu hak narapidana wanita diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 11-12.

makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.²

Salah satu hak narapidana wanita adalah menyusui bayinya. Menyusui dapat menunda kesuburan seorang wanita, dan mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra meopause, dan kanker ovarium.³ Air susu ibu (ASI) juga bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang disusunya. Pemberian ASI sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayi.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap manusia dimulai sejak manusia itu dilahirkan atau bahkan sejak dalam kandungan.

Minumnya kapasitas, ketidaklengkapan fasilitas, dan buruknya pelayanan di lembaga pemasyarakatan, serta kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana terlebih bagi narapidana wanita, sehingga dalam hal ini wanita adalah objek yang paling rentan akan bahaya psikis dan fisik.⁵ atas dasar tersebut, timbulnya berbagai masalah atau opini dalam masyarakat, diantaranya bagaimana pelaksanaan dan pemeberian pelayanan terhadap hak-hak narapidana wanita menyusui di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, sehingga dalam hal ini wanita mendapat perlindungan atas hak-hak kodratnya.

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan apakah hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

2. METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum/skripsi yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1), Pasal 14;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 231.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, <http://www.kinerja.or.id/pdf/5dffe9b9-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.25 WIB.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Adik Wibowo & Tim, 2015, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, PT Rajafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

⁵ Munawir Azis, 2010, *Melindungi Tahanan Perempuan*, Suara Merdeka.com, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.50 WIB.

3614. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 3, dan Pasal 14 ayat (1);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Pasal 1 angka 1, dan Pasal 49 ayat (2) dan (3);
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234. Pasal 1 angka 1;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Pasal 128 ayat (2), dan Pasal 142 ayat (1);
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846. Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) dan (3);
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291. Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum dieperoleh melalui literatur, surat kabar, internet, dan fakta hukum, maupun narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier berupa pengertian istilah atau bahasa sehari-hari menurut kamus.
- b. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari sumber hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan narasumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.
- c. Analisis Data
- 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif yang akan dilakukan, yaitu :
- a) Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.
- b) Sistematisasi hukum positif
Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum.
- c) Analisis hukum positif
Peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- d) Interpretasi hukum positif
Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan bahasa hukum. Interpretasi sistematis yang mengartikan suatu ketentuan hukum

berdasarkan sistem hukum. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologi untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana penerapan hukum positif mengenai hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, dan internet. Dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga diperoleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber :

- a) Narapidana S
- b) Pengelola Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Ibu Hastiti Budiutami, S.H.
- c) Ka. Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Ibu Tri Astuti, S.Ag., M.Hum.
- d) Pengelola Pembinaan Intelektual Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Ibu Kandi Tri Susilaningsih, S.H., M.H.
- e) Perawat Ahli Muda Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Bapak Sunardi, S.Kep.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif. Diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah mengenai isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dan kesimpulan khusus berupa hasil penelitian dari hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak menurut Pengantar Hukum Indonesia adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.⁶ Diberlakukannya perlindungan hukum, hak asasi manusia berkembang menjadi hak-hak hukum bagi setiap orang (*legal rights*).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena kodratnya sebagai manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasinya sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan sampai manusia itu meninggal dunia. Hak asasi manusia bukan berasal dari pemberian seseorang, hukum, maupun negara, tetapi merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjamin kelangsungan hidup, harkat dan martabatnya didunia ini, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu dasar jaminan dan perlindungan hak asasi manusia tertuang didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini, baik laki-laki dan wanita memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Setiap manusia mempunyai hak yang sama tidak terkecuali

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 90.

bagi narapidana yang dijatuhi hukuman akibat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁷ Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.⁸

Lahirnya sistem pemasyarakatan dan cara-cara pelaksanaan pidana penjara dengan ide-ide pemasyarakatan telah membuat suasana baru di bidang kepenjaraan terlebih di Negara Indonesia. Pelaksanaan pidana penjara mulai memperhatikan hak-hak asasi narapidana. Perlakuan terhadap narapidana merupakan hal yang sangat penting mengarah pada pembinaan agar kelak keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.⁹ Hak narapidana adalah kewenangan yang memiliki landasan hukum dan dilindungi hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Hak-hak narapidana lainnya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah grasi dan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung, dan hak atas amnesti dan abolisi yang juga diberikan oleh Presiden melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

Hak narapidana laki-laki dan hak narapidana wanita pada dasarnya sama, namun narapidana wanita mempunyai hak kodrati yang tidak dimiliki narapidana laki-laki, yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wanita adalah perempuan dewasa; kaum, kaum putri (dewasa).¹² Indonesia telah mengakui hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan wanita, dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Salah satu jaminan hak wanita diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3), bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 163.

⁸ Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 44.

⁹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 177.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 7.

¹² Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1556.

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam penjelasannya, bahwa perlindungan khusus yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Salah satu hak wanita adalah menyusui bayinya. Menyusui adalah memberikan air susu untuk diminum (kepada bayi dan sebagainya) dari buah dada; memberi air susu kepada: binatang pada umumnya ~ anaknya sambil berdiri.¹³ Menyusui bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang disusui, disamping itu menyusui juga bermanfaat bagi ibu, yaitu :

1. Membantu rahim kembali ke ukuran normal.
2. Membantu tubuh mengontrol pendarahan setelah melahirkan.
3. Mengurangi resiko kanker payudara dan rahim.
4. Membantu diet setelah melahirkan.
5. Mengurangi biaya pembelian susu formula.
6. Menyusui dengan ASI tidak membutuhkan persiapan dan selalu tersedia dalam kondisi segar serta terbaik untuk bayi.
7. Menyusui bayi akan meningkatkan kedekatan ibu dan bayi.¹⁴

Dalam hal ini, hak narapidana wanita menyusui diatur lebih khusus dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Pemberian makanan tambahan kepada ibu menyusui merupakan upaya untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan pada siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut

usia dengan prioritas kepada kelompok rawan, salah satunya adalah wanita hamil dan menyusui.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan terdapat 6 (enam) blok untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki dan 1 (satu) dan 1 (satu) blok untuk WBP wanita. Kapasitas di lembaga pemasyarakatan adalah 800 (delapan ratus) orang, dan sampai dengan bulan November 2016 jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan berjumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) orang, serta terdapat 1 (satu) narapidana wanita yang sedang menyusui dan membawa tanggungan bayi.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta tidak memberikan perlakuan khusus kepada narapidana wanita menyusui berkenaan dengan makanan tambahan. Lembaga pemasyarakatan hanya memberikan makanan tambahan berupa penambahan jumlah porsi makanannya saja yang menjadi 2 (dua) porsi untuk satu orang narapidana wanita menyusui, bukan makanan tambahan yang berupa buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sari buah, ataupun makanan bergizi lain yang diperlukan oleh wanita menyusui. Makanan bergizi sangat diperlukan bagi ibu menyusui untuk menghasilkan ASI yang baik.¹⁵ Ibu menyusui yang tidak memperoleh makanan gizi seimbang, maka dapat menyebabkan ibu kekurangan gizi, kurang darah (*anemia*), dan penyakit-penyakit lainnya.¹⁶

Selain makanan tambahan, narapidana wanita menyusui perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan bagi

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1363.

¹⁴ Qorry 'Aina Abata, 2015, *Merawat Bayi Baru Lahir* (Cetakan 1), Yayasan PP Al-Furqon, Madiun, hlm. 205.

¹⁵ A. August Burns, dkk, 2000, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 163.

¹⁶ *Ibid.*

wanita menyusui juga diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya, yaitu adalah pelayanan kesehatan berkenaan dengan salah satunya adalah menyusui.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta setiap WBP termasuk narapidana wanita menyusui yang mengeluhkan sakit akan dirawat dan diobati di klinik yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan. Sama dengan WBP lain, bayi narapidana wanita menyusui yang sakit juga akan dirawat dan diobati di klinik di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila kondisi narapidana wanita menyusui atau bayinya tidak kunjung sembuh atau justru menurun kondisinya setelah dirawat dan diobati di klinik di dalam lembaga pemasyarakatan, maka petugas lembaga pemasyarakatan akan merujuknya ke rumah sakit pemerintah yang berada di luar lembaga pemasyarakatan tanpa dipungut biaya sama sekali.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta melakukan kegiatan atau pembinaan terhadap WBP yang bertujuan untuk menghasilkan narapidana yang baik dan berguna bagi masyarakat saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan terdiri dari program kepribadian dan kemandirian sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program kepribadian terdiri dari :

- a. Intelektual
Pemberantasan butas huruf dan terdapat perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang terbuka untuk semua orang di lembaga pemasyarakatan termasuk WBP.
- b. Jasmani
Olahraga senam pagi dan volley wanita setiap seminggu 2 (dua) kali, perawatan kesehatan, dan lain-lain.
- c. Rohani
Menjalankan ibadah keagamaan berjamaah atau bersama-sama seperti sholat berjamaah bagi WBP yang beragama Islam, pengajian bagi narapidana wanita yang beragama

Islam seminggu sekali, WBP yang beragama Kristen kecuali hari kamis dan jum'at di minggu terakhir, dan agama-agama lain tergantung instruktur dari kantor wilayah keagamaan, dan kegiatan ini dilakukan di blok masing-masing.

Program kemandirian terdiri dari pelatihan kerja dan kegiatan kerja, yaitu bengkel kerja, dan lain sebagainya. Kegiatan pembinaan tersebut dilakukan secara rutin oleh setiap WBP, dan apabila WBP yang tidak mengikuti kegiatan tersebut terus-menerus akan diberi hukuman, yaitu tidak akan direkomendasikan untuk mendapatkan haknya, seperti remisi. Petugas lembaga pemasyarakatan dapat memperbolehkan WBP untuk tidak mengikuti pembinaan, seperti WBP yang sedang sakit, lanjut usia, hamil, atau menyusui anaknya dengan alasan kemanusiaan. Dalam hal ini, petugas lembaga pemasyarakatan memberikan kebebasan dan kelonggaran bagi narapidana wanita menyusui untuk tidak melakukan seluruh kegiatan atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan memberikan waktu kepada narapidana wanita untuk menyusui dan menjaga bayinya saja. Hal demikian, sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pihak keluarga, pemerintah, termasuk lembaga pemasyarakatan harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu.

Selain penyediaan waktu, berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa lembaga pemasyarakatan harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan fasilitas khusus. Dalam hal ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta tidak memberikan fasilitas khusus atau tempat khusus bagi narapidana wanita untuk menyusui bayinya, melainkan narapidana wanita menyusui dan bayinya ditempatkan di satu sel dengan narapidana-narapidana lainnya.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, yang tidak sesuai

dengan aturan atau belum optimal pemberian haknya, yaitu :

- a. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu pemberian makanan tambahan di lembaga pemasyarakatan yang masih berupa kuantitas belum kualitas yang diperlukan narapidana wanita menyusui.
- b. Berdasarkan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu lembaga pemasyarakatan baru memberikan waktu untuk narapidana wanita menyusui, namun belum memberikan fasilitas khusus atau tempat atau sel khusus bagi narapidana wanita untuk menyusui bayinya.
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, pemberian hak yang sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana wanita menyusui dengan baik.

5. REFERENSI

Buku :

Adik Wibowo & Tim, 2015, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, PT Rajafindo Persada, Jakarta.

August Burns A., dkk, 2000, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*, ANDI, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung.

Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Qorry 'Aina Abata, 2015, *Merawat Bayi Baru Lahir* (Cetakan 1), Yayasan PP Al-Furqon, Madiun.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

Website :

<http://www.kinerja.or.id/pdf/5dffe9b9-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.25 WIB.

Munawir Azis, 2010, Melindungi Tahanan Perempuan, Suara Merdeka.com, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.50 WIB.

